

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara lembaga dan organisasi pemerintah menjalankan tugas dan aktivitasnya. Pemanfaatan teknologi informasi, terutama sistem informasi berbasis *web*, menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kerja pemerintahan [1]. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat [2].

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, penerapan *e-Government* diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien [3]. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) melalui Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) mengembangkan berbagai aplikasi internal yang mendukung proses kerja di lingkungan DPR RI, salah satunya adalah **SINCAN (Sistem Informasi Perencanaan)** [4].

Namun, seiring berkembangnya kebutuhan organisasi dan kemajuan teknologi *web*, sistem SINCAN yang sebelumnya dibangun menggunakan *Zend Framework 2.0* mulai mengalami keterbatasan, terutama dalam hal kinerja, kompatibilitas, dan efisiensi pengembangan aplikasi. Keterbatasan tersebut berdampak pada meningkatnya kompleksitas pemeliharaan sistem, kurangnya fleksibilitas dalam pengembangan fitur baru, serta potensi hambatan dalam mendukung kebutuhan perencanaan yang semakin dinamis.

Oleh karena itu, dilakukan proses migrasi dari *Zend Framework 2.0* ke **Laravel 12**, yaitu *framework* berbasis PHP modern yang memiliki dukungan komunitas luas, struktur pengembangan yang lebih efisien, serta tingkat keamanan yang lebih baik [6]. Migrasi ini bertujuan untuk meningkatkan performa sistem, mempermudah proses pengembangan, serta memastikan sistem SINCAN tetap relevan dengan kebutuhan organisasi di era digital. Dengan adanya migrasi ini, diharapkan proses perencanaan di lingkungan Setjen DPR RI dapat berjalan lebih

cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik [7].

## 1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kegiatan kerja magang ini bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam lingkungan kerja profesional. Melalui kegiatan magang, mahasiswa dapat menerapkan kemampuan teknis (*hard skills*) dan kemampuan nonteknis (*soft skills*) secara langsung dalam mendukung pelaksanaan tugas di instansi pemerintahan.

Selain sebagai sarana penerapan ilmu, kerja magang ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap alur kerja, tata kelola, serta budaya kerja yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Mahasiswa dilatih untuk berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proses pengembangan sistem informasi.

Dengan mengikuti program kerja magang ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja yang relevan, memperluas wawasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi di sektor pemerintahan, serta membangun kesiapan profesional sebagai bekal memasuki dunia kerja di masa mendatang.

## 1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh instansi serta universitas, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Waktu Pelaksanaan:** Kegiatan kerja magang dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2025 hingga 15 Desember 2025, bertempat di Sekretariat Jenderal DPR RI.
2. **Jam Kerja:** Pelaksanaan magang dilakukan dengan sistem *hybrid*, yaitu kombinasi antara *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH). Kegiatan WFO dilaksanakan pada hari Senin hingga Kamis, sedangkan WFH dilaksanakan pada hari Jumat. Jam kerja dimulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB dengan waktu istirahat selama satu jam.
3. **Lokasi Kerja:** Kegiatan WFO dilaksanakan di Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal DPR RI yang berlokasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

4. **Absensi Kehadiran:** Pencatatan kehadiran dan pelaporan aktivitas magang dilakukan melalui aplikasi **PRO-STEP** yang disediakan oleh Universitas Multimedia Nusantara sebagai sarana pemantauan kegiatan magang mahasiswa.
5. **Etika dan Pakaian:** Selama pelaksanaan magang, mahasiswa diwajibkan mematuhi tata tertib dan etika kerja yang berlaku di lingkungan Pustekinfo DPR RI, termasuk kedisiplinan waktu serta penggunaan pakaian formal atau semi-formal yang rapi dan sopan.

Mahasiswa wajib menaati seluruh peraturan yang berlaku selama kegiatan kerja magang berlangsung, baik yang ditetapkan oleh instansi maupun oleh universitas. Dengan demikian, pelaksanaan kerja magang diharapkan dapat berjalan dengan tertib serta memberikan manfaat optimal bagi mahasiswa dan instansi terkait.

